

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus, ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia sehingga sudah seharusnya kemiskinan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh, kemiskinan merupakan muara dari masalah sosial lainnya.

Kompleksitas persoalan kemiskinan membutuhkan upaya penanggulangan yang utuh dan menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir secara baik. Banyak pendapat dan asumsi yang lebih mirip mengatakan bahwa kemiskinan itu dipicu oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan. Namun jika ditelusuri lebih jauh, ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan program-program pengentasan kemiskinan. Faktor-faktor

itu dapat dilihat dari aspek perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius. Hal ini dikarenakan kemiskinan dapat memicu banyak persoalan yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan terselubung, dimana mereka tidak produktif dalam pekerjaannya (musiman). Pengangguran model tersebut menempati porsi yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun mereka dalam status dan posisi sedang bekerja.

Bandar Lampung merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, tingkat kemiskinan atau jumlah orang miskin di Kota Bandar Lampung naik signifikan dibanding pedesaan. Persentasenya 0,26% dibanding pedesaan yang hanya 0,11%. Capaian ini menunjukkan, pada periode ini penurunan tingkat kesejahteraan penduduk miskin justru lebih cepat terjadi di perkotaan dibanding pedesaan. Data BPS Provinsi Lampung pada Desember 2016 Bila dilihat secara persentase, angka 0,26% mungkin terhitung kecil. Namun bila dilihat secara jumlah, angka kenaikannya cukup fantastis hingga mencapai 9.100 jiwa. Angka ini mendongkrak posisi jumlah orang miskin kota Bandar Lampung, Pada Desember 2015 berada posisi 233.270 jiwa Indikasi lainnya, dilihat dari daerah tempat tinggal, penduduk miskin di kota Bandar Lampung Persentase penduduk miskin kota Bandar

Lampung mencapai 10,94%. Selama periode 2014–2015, garis kemiskinan pada Tahun 2015 juga naik Rp19.174 atau 6,01% dari Rp. 318.822 menjadi Rp337.996 per kapita per bulan. Nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) untuk Kota Bandar Lampung pada Tahun 2015 sudah mencapai 1,673. Sedangkan posisi nilai indeks keparahan kemiskinannya (P2) mencapai 0,379. Jadi jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Bandar Lampung sampai sekarang mencapai 233.270 ribu Jiwa. Peningkatan nilai garis kemiskinan inilah yang kemudian menggerak naiknya jumlah orang miskin khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung. Indikatornya bisa diukur dari ketidakmampuan masyarakat dalam mengimbangi tingginya harga-harga kebutuhan pokok di pasaran.

Selama ini persoalan kemiskinan yang terdapat di Kota Bandar Lampung terutama di Kelurahan Sukaraja salah satu permasalahan yaitu masih rendahnya sumberdaya manusia, yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam merebut peluang kerja. Sehingga, hal itu menjadi penyebab tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Rendahnya sumberdaya manusia ini dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan yang masih rendah. Berdasarkan grafik penduduk miskin Kota Bandar Lampung pada tahun 2014-2016 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 233.270 ribu jiwa.

Perkembangan kesejahteraan masyarakat dari varian tingkat pendidikan dan pekerjaan yang terdapat di Kelurahan Sukaraja Kota Bandar Lampung berjalan cukup lambat jika dilihat dari fakta empiris yang dijelaskan diatas, dan lebih parahnya hal ini tidak hanya terdapat diwilayah Bandar Lampung, melainkan hampir seluruh Wilayah yang ada di Indonesia mengalami hal yang

serupa, maka dari itu menyikapi fenomena tersebut, pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun Program Bantuan Sosial untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk masyarakat yang tergolong miskin dan membantu secara langsung masyarakat yang membutuhkan, hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial Nasional, dan di tindaklanjuti melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan demikian, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial, pemerintah pusat dan daerah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM.

Salah satu tujuan PKH adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah anak bagi anak-anak KSM, khususnya SD/MI dan SMP/MTs, serta untuk mengurangi pekerja dibawah umur di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, PKH pendidikan bermotivasi berupaya memotivasi Keluarga Sangat Miskin (KSM) agar mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar, minimal 85% dari hari efektif sekolah dalam sebulan, selama tahun ajaran berlangsung. Bagi anak-anak peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen kehadiran 85% dari hari belajar efektif setiap bulan akan dikenakan sanksi melalui pengurangan bantuan sebesar 10% dari setiap bulan sebelum pembayaran periode berikutnya. Ketentuan

tidak berlaku bagi ketidakhadiran yang diakibatkan sakit, bencana alam dan bencana sosial.

Pencatatan kehadiran siswa peserta PKH dilayanan pendidikan dilakukan oleh guru dan Tata Usaha. Pendamping melakukan pengisian ketidakhadiran peserta didik kedalam formulir verifikasi. Kemudian Kepala sekolah membubukan tandatangan dan stempel dalam formulir verifikasi yang telah diisi. Kegiatan pendampingan PKH di Kelurahan Sukaraja dalam melakukan aktifitas rutin PKH selain mengambil foto kegiatan, membuat berita acara saat pertemuan kelompok, membuat Ceklist Kegiatan Pendamping (CKP), membuat laporan bulanan. Koordinasi rutin dengan aparat pemerintahan di wilayah dampingan. (Direktorat Jaminan Sosial, 2013:9).

Penerima bantuan PKH yang selanjutnya disebut peserta PKH adalah KSM yang berdomisili dilokasi terpilih yang memiliki satu atau beberapa kriteria:

- a. Memiliki anak SD/MI Sederajat
- b. Memiliki anak SMP/MTS Sederajat

Besar bantuan tunai yang diterima oleh peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang dihitung menurut ketentuan penerimaan bantuan komponen pendidikan. Dikemudian hari besaran bantuan akan berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta PKH tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Anak peserta pendidikan SD/MI Rp. 450.000 Per KSM/Tahun
- b. Anak peserta pendidikan SMP/MTS Rp. 750.000 Per KSM/Tahun

Dengan bergulirnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintahan Daerah Bandar Lampung merespons masalah kemiskinan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G. 308/III.04/HK/2014 tentang pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung tahun 2014 yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu keluarga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan Pendidikan Dasar dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan menerbitkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor :W/ 214 /Kpts/7/02/2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kota Bandar Lampung Tahun 2014. Dimana Dinas Sosial Kota Bandar Lampung merupakan Instansi yang memiliki tanggungjawab melaksanakan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dimana salah satu tugasnya memberikan dampingan, arahan, informasi, peraturan dan pengambilan penyaluran bantuan kepada masyarakat kategori keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan.

Untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Berkoordinasi dengan beberapa instansi antara lain:

1. Badan Pusat Statistik

Mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk mensensus penduduk Bandar Lampung yang termasuk kedalam kategori masyarakat Keluarga Sangat Miskin (KSM), untuk diberikan berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

bidang pendidikan, kemudian data yang telah disensus diberikan kepada instansi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

2. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk memonitoring/memferivikasi pencatatan kehadiran siswa/siswi sekolah kategori Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan.

3. PT. Pos Kota Bandar Lampung

Mempunyai tugas pokok dan kewenangan memfalisitasi tempat dan memberikan penyaluran bantuan kepada masyarakat kategori Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung merupakan lokasi yang dijadikan objek penelitian Dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, peternak, pedagang dan buruh pabrik yang merupakan ciri khas kehidupan masyarakatnya, mengingat wilayah Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras terletak di daerah perkotaan dan Sukaraja sebagai kota pendukung dari kota Bandar Lampung maka sangat ironi melihat realita masyarakat yang masih banyak terdapat keluarga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka.

Kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras ini membutuhkan penanganan yang tepat karena melihat dari kondisi geografis Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras ini terletak di wilayah perkotaan, kemiskinan yang terjadi di perkotaan itu secara konseptual penanganannya lebih sulit dibandingkan dengan wilayah di pedesaan, karena wilayah perkotaan yang menjadi tolak ukur kesejahteraan adalah keuangan, oleh karenanya penanganan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras ini benar-benar membutuhkan suatu program yang tepat pada sasaran. Menyadari akan hal itu, maka Program Keluarga Harapan (PKH) di gulirkan di

Kota Bandar Lampung untuk merespons permasalahan yang ada, seperti yang terdapat di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Kota Bandar Lampung khususnya yang terdapat di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras untuk ikut berperan serta terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan yang selama ini menjerat keluarga sangat miskin (KSM). Dan disadari sepenuhnya bahwa PKH ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada Keluarga sangat miskin (KSM) dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Sekalipun Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras telah melaksanakan program bantuan PKH sesuai yang direncanakan, namun berdasarkan peninjauan awal melalui observasi, memperlihatkan bahwa proses pengentasan kemiskinan melalui PKH komponen pendidikan yang dilaksanakan di Kelurahan Sukaraja dalam realisasinya belum optimal. Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan dalam data tabel 1.1. dibawah ini :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Peserta Penerima Bantuan Program Keluarga
Harapan Komponen Pendidikan di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras
Pada Tahun 2016

Tahun	Penerima Bntuan PKH Komponen pendidikan	Penerima Bantuan PKH	Realisasi	Prosentase (%)
2016	1.Siswa SD/Madrasah Ibtidaiyah /Paket A/Sederajat.	229	161	70%
	2.Siswa SMP /Madrasah Tsanawiyah /Paket B/Sederajat	90	63	70%

Sumber Data: UPPKH Kecamatan Bumi Waras 2017

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan komponen pendidikan di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras belum efektif. Dimana Pada Tahun 2016 Siswa SD/Madrasah Ibtidaiyah /Paket A/Sederajat dari jumlah siswa yang berhak menerima bantuan sebanyak 229 hanya terealisasi sebanyak 161 orang dan Siswa SMP /Madrasah Tsanawiyah /Paket B/Sederajat dari jumlah siswa yang berhak menerima bantuan sebanyak 90 siswa hanya terealisasi sebanyak 63 sisaw.. Dengan demikian harapan pemerintah Kota Bandar Lampung dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Kota Bandar Lampung khususnya yang terdapat di kelurahan Sukaraja kecamatan Bumi Waras untuk ikut berperan serta terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan untuk memutus rantai kemiskinan yang selama ini menjerta keluarga sangat miskin (KSM) belum bisa terwujud.

Indikasi-indikasi lain yang menunjukkan belum efektifnya Program Keluarga Harapan pada bidang pendidikan di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung antara lain:

1. Program bantuan sosial PKH belum mampu meningkatkan Taraf Pendidikan peserta KSM
2. Adanya ketidakvalidan dan kelayakan peserta PKH. Contoh : Ada beberapa masyarakat yang tidak dapat bantuan PKH dikarenakan BPS masih menggunakan data lama. Artinya pendataan dan penentuan yang dilakukan Instansi Badan Pusat Statistik prioritas sasaran dari program ini belum tepat.
3. Banyak petugas dari fasilitas pendidikan belum mengerti tentang PKH dan banyak diantara mereka yang tidak dapat undangan saat BIMTEK Provider sehingga sama sekali belum mengerti tentang PKH
4. Tidak disiplinnya masyarakat mengikuti peraturan PKH. Ada beberapa KSM yang tidak menghadiri pertemuan awal untuk mengikuti sosialisasi program.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti berasumsi hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun dalam penelitian ini peneliti akan mencoba melakukan pendekatan penelitian melalui variabel koordinasi. Alasan peneliti menggunakan pendekatan melalui koordinasi hal ini dikarenakan masih ditemukannya beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerima bantuan Program Keluarga Harapan bidang pendidikan di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras maka perlu ada koordinasi dari pihak terkait, agar dalam pelaksanaannya dapat menjangkau kelompok sasaran yang tepat dan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Bantuan PKH ini diharapkan dapat membantu KSM di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras agar dapat mengakses pelayanan dasar, khususnya pelayanan pendidikan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dan menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Koordinasi Dinas Sosial terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan bidang pendidikan (Studi di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut “Seberapa Besar Pengaruh Koordinasi Dinas Sosial Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan bidang pendidikan di Kelurahan Sukaraja kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengkaji Seberapa Besar Pengaruh Koordinasi Dinas Sosial Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Besarnya Pengaruh Koordinasi Dinas Sosial Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memenuhi kegunaan dari aspek teoritis, aspek praktis.

1. Kegunaan Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan juga penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat serta sebagai bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang terkait.
2. Kegunaan Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan koordinasi Program Keluarga Harapan, khususnya bagi pihak Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan Koordinasi Program Keluarga Harapan.